

Perspektif Aksiologi terhadap Pendidikan Berkeadilan di Indonesia

Author:

Yeanny Suryadi¹
Dian Armanto²
Wildansyah Lubis³
Triayuni⁴

Affiliation:

Universitas Negeri
Medan^{1,2,3}
SMA Maitreyawira⁴

Corresponding email

yeanny.suryadi@gmail.com
armantodian@gmail.com
triayunihartati@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2026-03-08
Accepted: 2026-04-18
Published: 2026-04-19



*This is an Creative Commons License
This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License*

Abstrak:

Pendidikan menjadi pilar kuat berkembangnya suatu bangsa menuju kemajuan yang hakiki dan berkeadilan. Pendidikan merupakan pilar untuk membangun suatu bangsa yang kuat, berkarakter serta mampu berkembang sesuai jaman dengan tetap menjaga budaya-budaya luhur bangsanya yang menjadi tumpuan norma atas karakteristik bangsa itu sendiri. Isu -isu hangat terkait dengan aspek pendidikan, terus menjadi perhatian yang dihubungkan terhadap bagaimana kontribusi pemerintah dalam upayanya mengimplementasikan pendidikan yang merata, bermakna, sehingga pemerataan pembangunan dalam wacana ‘no one left behind’ menuju Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Penelitian ini memaparkan sejauh apa wacana pendidikan berkeadilan di Indonesia telah diimplementasikan melalui sudut pandang aksiologi. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan. Pengumpulan data terkait pendidikan berkeadilan, pendidikan yang inklusif dikumpulkan melalui artikel-artikel yang didapatkan dari pangkalan data akademik seperti google scholar, Taylor and Francis dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam perspektif aksiologi, langkah-langkah pemerintah dalam menegakkan pendidikan yang berkeadilan telah terwujud melalui berbagai kebijakan, program implementatif, serta inisiatif strategis yang berorientasi pada pemerataan dan inklusivitas pendidikan. Secara aksiologi pendidikan berkeadilan bermaksud untuk menindak lanjuti wacana kesejahteraan sosial secara merata, membangun masyarakat berbudi luhur kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia diberbagai wilayah dengan beragam latar belakang ekonomi, geografis, status sosial dan sebagainya. Langkah-langkah bijaksana telah diambil dengan tujuan yang sudah ditetapkan, hambatan dan dukungan yang ada menjadi dasar pengembangan kebijakan selanjutnya.

Kata kunci: Aksiologi; Pendidikan di Indonesia; Pendidikan Berkeadilan

Pendahuluan

Kepentingan melihat suatu fenomena melalui perspektif filosofis menjadi hal yang fundamental agar objek yang diamati tidak hanya dipahami secara permukaan, tetapi juga memperoleh kejelasan makna yang komprehensif. Pendekatan filosofis memungkinkan suatu kajian ditelaah dari tiga dimensi utama, mulai dari aspek ontologis yang membahas hakikat keberadaan suatu fenomena, aspek epistemologis yang mengkaji bagaimana pengetahuan tentang fenomena tersebut diperoleh dan divalidasi, hingga aspek aksiologis yang menelaah nilai, tujuan, serta manfaat dari fenomena tersebut dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, suatu objek kajian tidak hanya dipahami dari sisi harfiahnya semata, tetapi juga dari asal-usulnya, struktur maknanya, serta relevansi dan kontribusinya dalam membangun kehidupan yang bermakna.

Filsafat pendidikan merupakan sebuah cabang ilmu yang membahas hal-hal terkait isu-isu terhadap pendidikan melalui perspektif filsafat. Ini menjadi hal yang penting untuk dikaji, sebab pada hakikatnya manusia bukan sekedar hidup untuk memenuhi kebutuhan biologisnya saja, namun manusia dengan kodratnya sebagai makhluk sosial, memiliki tekad untuk membangun suatu peradaban kehidupan sosial yang bermakna dalam bermasyarakat. Manusia terus mengembangkan kehidupan bermasyarakatnya hingga bernegara dan fokus kepada pemenuhan atas kebutuhan manusia seutuhnya meliputi kebutuhannya lahir dan batin sesuai tuntunan jaman dan banyak faktor (Rahma & Wantini, 2024; Bauer, -Koenke, & Fort, 2025). Pemenuhan kebutuhan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal individu saja, tetapi juga oleh kondisi lingkungan sosial, budaya, dan geografis yang melingkupinya. Faktor-faktor seperti letak geografis, sumber daya alam, serta keberagaman suku, bahasa, dan budaya menjadi determinan penting dalam arah dan laju perkembangan suatu bangsa, karena varian kondisi tersebut mempengaruhi tata nilai sosial, pola interaksi, kebijakan publik, dan struktur ekonomi yang menjadi landasan peradaban masyarakat beradab (Voigt, 2023) .

Hal-hal di atas merupakan dasar fundamental terkait bagaimana pendidikan menjadi kerangka penting dalam membangun suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang luhur. Pendidikan sebagai wasilah harus mampu harus dibangun secara adaptif, juga disesuaikan dengan karakteristik dan budaya bangsa itu sendiri. Faktor -faktor yang mempengaruhi kondisi negara Indonesia, baik dari sejarah, kondisi saat ini, hingga perkiraan menginjak abang 21 yang serba canggih, harus menjadi pertimbangan bagaimana pendidikan bisa merangkul seluruh lapisan masyarakat dari berbagai sudut pandang (geografis, ekonomis, karakteristik suku, bahasa, isu disabilitas).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pendidikan berkeadilan di Indonesia dari perspektif aksiologi, khususnya dalam menelaah nilai-nilai keadilan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Melalui pendekatan aksiologis, penelitian ini berupaya memaparkan bagaimana konsep pendidikan berkeadilan dimaknai dalam kerangka nilai, etika, dan kebermanfaatan pendidikan bagi seluruh warga negara, serta sejauh mana pemerintah Republik Indonesia telah mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan dan praktik penyelenggaraan pendidikan. Kajian ini dilakukan dengan menelaah berbagai kebijakan pendidikan, regulasi, serta program-program yang berkaitan dengan pemerataan akses dan kesempatan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini juga didasarkan pada telaah terhadap berbagai penelitian sebelumnya yang relevan, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi nilai pendidikan berkeadilan serta implementasinya dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Studi Literatur

Filsafat

Memaknai pendidikan erat kajiannya terhadap bagaimana sebuah pemikiran atas logika bisa diselaraskan terhadap estetika, atau keindahan cara berpikir yang logis dan mendalam. Filsafat merupakan buah pikir mendalam terhadap seluruh pertanyaan yang tendensius secara konseptual dan koheren dengan muatan sarat hakekat. Ini yang menjadikan filsafat dikenal sebagai induk dari ilmu pengetahuan atas cabang-cabang ilmu lainnya. (Rosnawati, Syukri, Badarussyamsi, & Rizki, 2021).

Beberapa filsuf kenamaan menyebutkan filsafat sebagai ilmu pengetahuan untuk mencari kebenaran asli atas segala yang ada (Plato 427-348 SM), sedang Aristoteles di tahun 384-322 SM menyatakan filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, sosial budaya dan estetika atau menyelidiki sebab dan asas segala benda. Sejalan dengan pandangan tersebut, Cicero (106–43 SM) menegaskan bahwa filsafat merupakan

induk dari seluruh ilmu pengetahuan yang berakar dari ciptaan Tuhan. Dalam konteks pendidikan, pemikiran filsafat menjadi landasan fundamental dalam pembentukan nilai (value) manusia. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk mengintegrasikan filsafat ke dalam kerangka teori pendidikan, dengan tujuan untuk membahas berbagai permasalahan pendidikan secara kritis dan mendalam, serta mendukung pengembangan kualitas intelektual dan kemampuan berpikir yang komprehensif (Khan, 2025).

Pada hakikatnya memahami sesuatu melalui filsafat, berarti memahami hal tersebut secara mendalam terhadap 3 komponen filsafat yang dikenal dengan trilogi filsafat, yaitu ontologi (hakikat realitas), epistemologi (bagaimana pengetahuan bisa didapatkan), dan aksiologi (nilai atau tujuan terkait pengetahuan tersebut).

Ketiga komponen tersebut merupakan landasan fundamental seseorang dalam berfilsafat. Ontologi berkaitan dengan pembahasan mengenai hakikat realitas atau keberadaan suatu objek yang dikaji dalam ilmu pengetahuan. Epistemologi membahas mengenai sumber, metode, serta proses bagaimana pengetahuan diperoleh dan divalidasi kebenarannya. Sementara itu, aksiologi berkaitan dengan nilai, etika, serta manfaat dari pengetahuan yang dihasilkan, termasuk bagaimana pengetahuan tersebut digunakan untuk kepentingan kehidupan manusia dan masyarakat.

Pendidikan dari Perspektif Filsafat

Filsafat pendidikan sendiri merupakan pembahasan secara filsafat mengenai isu-isu, permasalahan terkait dengan dunia pendidikan. Filsafat menjadi perangkat mengenai kemana arah pendidikan ini akan dibawa, bagaimana pendidikan menjadi ruh dari semua kebijaksanaan yang diterapkan dalam pelaksanaan hal-hal yang berkaitan, untuk pembentukan manusia yang berakal bermoral dan beradab (Sugiarta, Putu Mardana, Adiarta, & Artanayasa, 2019) .

Jean-Jacques Rousseau (1762), seorang filsuf dan komposer kelahiran Jenewa Swiss, menyampaikan pendidikan bukan sekedar pembagian ilmu pengetahuan, namun pendidikan harus mampu mengembangkan para pelajar. Hal ini senada dengan pendapat Immanuel Kant (1724-1804), filsuf asal Jerman, yang menyoroti pendidikan sebagai langkah pembentukan manusia yang manusiawi, atau seutuhnya. Kant yang aktif dalam gagasan atas kebebasan berpikir rasionalisme apriori menjadikan pendidikan sebagai cikal pembentukan manusia yang luhur untuk suatu bangsa (pendidikan sekarang untuk masa depan) (Boiliu, Chandra, & Rantung, 2022). Filsuf asal Amerika Jhon Dewey (1894) menyatakan pendidikan harus menjadi suatu lembaga sosial yang mengedepankan nilai-nilai hubungan sosial. Melalui konsep konstelasi filsafat progresivisme, Jhon Dewey menyampaikan bahwasanya pembelajaran harus bersifat dinamis, kontekstual, dan berorientasi pada pemecahan masalah nyata, bukan sekedar transfer pengetahuan. Guru berperan sebagai fasilitator, sementara siswa didorong untuk berpikir kritis, bereksplorasi, dan membangun pengetahuan secara mandiri. Pada pedagogis pendidikan kontemporer, filsafat pendidikan Jhon Dewey banyak menjadi dasar pengembangan pendidikan masa kini (Supriatna, 2021)((Kristiawan, 2016).

Tidak hanya berasal dari benua Eropa, namun pembahasan terkait filsafat pendidikan menjadi poin penting yang dibahas oleh para filsuf asal Timur Tengah, diantaranya oleh Ibnu Sina. Filsuf asal Iran ini menyampaikan bahwasanya pendidikan harus berfokus kepada pembentukan akhlak, untuk pencapaian moral tertinggi manusia. Pendidikan akan memandu seorang manusia untuk memperbaiki diri dan mencapai perilaku bijaksana, adil dan bermoral.

Pendidikan juga menjadi fokus penting bangsa Indonesia , yang termasuk dalam kategori negara berkembang, Ki Hajar Dewantara, filsuf pendidikan asal Indonesia mendefinisikan pendidikan sebagai jalan untuk membimbing setiap anak menuju hidup sejahtera di masa mendatang dengan kodratnya masing-

masing, artinya pendidikan akan menjadi jalan untuk membentuk manusia yang bahagia, mandiri sebagai dasar pembentukan suatu masyarakat yang madani sesuai dengan karakteristik setiap individunya (Desi, Badariah, & Hidayat, 2022). Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, secara ontologi bisa dikatakan pendidikan merupakan wacana untuk membentuk manusia menjadi individu yang luhur, yang berkarakter, bermartabat, serta memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang selaras dengan potensi diri serta tuntutan perkembangan zaman, sehingga mampu berkontribusi secara positif terhadap pembangunan bangsa dan negara (Edeji, 2025). Dari sisi ontologi *lah* dibahas mengenai esensi keberadaan pendidikan dalam kehidupan manusia dan bagaimana pendidikan berperan dalam membentuk eksistensi manusia secara utuh, termasuk keberadaan pendidikan di era modern yang menjadi lebih holistik dengan melihat pendidikan sebagai ruang interaksi kompleks antara manusia, teknologi, dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berkaitan dengan realitas fisik, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan kultural yang membentuk pengalaman belajar individu (Ilahiya & Nugraha, 2025). Filsafat pendidikan menjadi isu hangat yang terus berkembang di setiap era sebab memiliki hubungan erat terhadap pengembangan dan kualitas akal seseorang (Khan, 2025).

Pendidikan yang Berkeadilan

Letak pendidikan dalam suatu peradaban merupakan fondasi yang harus diyakini dan diinternalisasi setiap pemangku kepentingan dalam suatu masyarakat untuk membentuk sebuah negara yang maju dan beradab. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun kualitas manusia secara menyeluruh. Pendidikan harus diterima dan dibangun secara menyeluruh kepada masyarakat, demi pembangunan yang adil dan merata. Wacana ‘no one left behind’ yang diusung tahun 2022 dalam Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai langkah untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 mengharapkan kontribusi aktif seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dalam pembangunan berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menekankan inklusivitas melalui peningkatan akses pendidikan berkualitas, peluang kerja di sektor formal, serta layanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas.

Pencapaian tujuan di atas memerlukan pemahaman mendalam mengenai pentingnya pendidikan yang berkeadilan. Pendidikan berkeadilan dan merata dalam perspektif ontologi memandang bahwa setiap manusia, tanpa memandang kondisi geografis, sosial, maupun ekonomi, memiliki hakikat sebagai subjek yang dapat berkembang dan berhak memperoleh pendidikan secara layak. Keberagaman kondisi tersebut, termasuk pada masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), masyarakat dengan disabilitas, merupakan realitas ontologis yang harus diakui dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan peserta didik (Nursyeha, 2025).

Secara epistemologis, pendidikan berkeadilan berfokus pada bagaimana pengetahuan diperoleh, dipahami, dan dibangun oleh peserta didik dengan mempertimbangkan keberagaman karakteristik, pengalaman, serta konteks sosial-budaya masing-masing individu secara inklusif. Dalam perspektif ini, setiap peserta didik memiliki cara belajar yang berbeda, sehingga proses pembelajaran tidak dapat diseragamkan, melainkan harus bersifat adaptif dan kontekstual sesuai dengan teori sosiokultural Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran sangat berakar pada pengalaman hidup dan latar belakang budaya siswa (Hassan, Jusoh, & Rahimi, 2025). Pendidikan berkeadilan menuntut adanya pendekatan yang memungkinkan peserta didik membangun pengetahuan berdasarkan realitas kehidupannya, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.

Aksiologi dari Pendidikan Berkeadilan

Kata aksiologi berasal dari dua gabungan kata dalam bahasa Yunani, yaitu *axio* yang artinya sesuatu yang berharga atau nilai atas sesuatu, dan *logos* yaitu ilmu pengetahuan atau teori yang berdasarkan akal. Bisa dijelaskan makna dari gabungan kata aksiologi adalah penilaian atas sesuatu secara mendalam melalui pemikiran yang berdasar kepada ilmu pengetahuan (Lisan & Maulana El-Yunusi, 2024).

Dari perspektif aksiologi, pendidikan berkeadilan dimaknai sebagai sejauh mana pendidikan mampu menjadi sarana pembentukan individu yang berkembang secara utuh, baik pada aspek kognitif maupun afektif, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Pendidikan berkeadilan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan masyarakat yang inklusif, beradab, dan berkeadilan sosial. Dalam konteks ini, pendidikan harus diselenggarakan secara kontekstual dan holistik, dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari identitas peserta didik itu sendiri, sehingga mampu menghasilkan kontribusi masyarakat yang efektif, adaptif, dan bermakna bagi pembangunan bangsa yang berkebhinekaan (Rahman, Nursalim, & Khami, 2024) (Sarwinda, Asyhar, Asrial, & Syaiful, 2025). Melalui perspektif aksiologi pendidikan yang berkeadilan di Indonesia dipahami sebagai upaya sistematis untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga mengandung nilai-nilai keadilan, moralitas, kemanusiaan, dan kebermanfaatan sosial. Aksiologi menempatkan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga memiliki kesadaran etis dan tanggung jawab sosial dalam menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis (Sari, Septemi, Yadi, Helita, & Elesti, 2025).

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep pendidikan berkeadilan dalam perspektif filosofis, khususnya melalui pendekatan aksiologi. Penelitian diawali dengan mengidentifikasi fenomena empiris yang berkembang di Indonesia terkait ketimpangan akses, kualitas, dan layanan pendidikan, yang kemudian difokuskan secara lebih spesifik pada isu pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagai kelompok yang rentan terhadap praktik ketidakadilan. Proses perumusan masalah dilakukan secara sistematis dengan mengkaji kesenjangan antara konsep ideal pendidikan berkeadilan dengan realitas implementasinya di lapangan, sehingga diperoleh fokus kajian yang terarah dan relevan dengan konteks pendidikan inklusif di Indonesia.

Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur akademik yang kredibel dan bereputasi, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku referensi, serta dokumen kebijakan pendidikan yang relevan. Sumber data diperoleh dari berbagai pangkalan data akademik seperti Google Scholar, Taylor & Francis, serta basis data ilmiah lainnya yang memiliki standar publikasi tinggi. Kriteria pemilihan literatur difokuskan pada publikasi dalam rentang tahun terkini (minimal tahun 2022) guna memastikan relevansi dan aktualitas kajian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, serta sintesis konseptual untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai implementasi pendidikan berkeadilan di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan, inklusivitas, dan pembangunan berkelanjutan tanpa diskriminasi.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berkeadilan di Indonesia secara konseptual telah memiliki landasan yang kuat, baik secara filosofis maupun normatif. Pancasila sebagai dasar negara terus dijadikan landasan filosofis dalam implementasi pendidikan yang berkeadilan. Hal ini tercermin dari berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Kurikulum Merdeka, serta kebijakan inklusivitas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menekankan prinsip pemerataan akses dan kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa

diskriminasi. Secara aksiologis, kebijakan tersebut mengandung nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan inklusivitas yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan demikian, secara nilai (value), pendidikan di Indonesia telah diarahkan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bermoral dan mampu berkontribusi dalam kehidupan sosial secara adil dan beradab.

Namun demikian, hasil kajian literatur juga menunjukkan bahwa implementasi pendidikan berkeadilan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), keterbatasan fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas, serta belum optimalnya kesiapan tenaga pendidik dalam menerapkan pembelajaran inklusif menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keadilan pendidikan secara nyata (Nusaibah, Darlene Nanariain, & Istiqamah, 2025). Selain itu, masih terdapat kecenderungan pendekatan pendidikan yang bersifat ‘seragam’, sehingga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi keberagaman karakteristik peserta didik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal pendidikan berkeadilan dengan praktik implementatif di lapangan (Kadim & Hendriani, 2025).

Terlepas dari hal di atas, telah ditemukan langkah-langkah bijaksana dalam model pembelajaran yang telah diimplementasikan, sebagai upaya dalam mencapai pendidikan yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan nilai dan keadilan sosial (Sari, Siregar, & Zahra, 2025)

Namun demikian langkah-langkah bijaksana dalam model pembelajaran telah banyak dilakukan dalam upaya mencapai pendidikan yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan nilai dan keadilan sosial. Pendidikan berperan dalam membangun akal budi suatu individu (Rahmadani, Armanto, Syafitri, & Umami, 2021). Melalui proses pendidikan adil, inklusif dan berorientasi pada nilai kemanusiaan, pendidikan diharapkan mampu mengurangi marjinalisasi sosial yang muncul akibat keberagaman latar belakang etnis, kondisi geografis, bahasa, isu disabilitas, gender dan budaya yang seringkali memunculkan ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, serta kesempatan sosial lainnya (Suarlin, Elpisah, & Nurfadila MY, 2026).

Pembahasan

Dari perspektif aksiologi, temuan penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan berkeadilan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai dasar yang melandasi kehidupan berbangsa, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat individu. Pendidikan berkeadilan bukan hanya tentang pemerataan akses, tetapi juga tentang bagaimana sistem pendidikan mampu memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi setiap individu. Hal ini selaras dengan pandangan filsafat pendidikan yang menempatkan manusia sebagai subjek utama pendidikan, yang harus dikembangkan secara utuh baik secara intelektual, emosional, maupun moral. Wacana ‘no one left behind’ yang diusung pada tahun 2022, memperkuat mengenai bagaimana pendidikan yang berkeadilan harus mampu menjangkau setiap lapisan, agar mampu berkontribusi bagi bangsanya, dalam mencapai Indonesia Emas kelak di tahun 2045. No one left behind adalah prinsip yang ditegakan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui jalan pendidikan. Secara aksiologi wacana ini bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan pembangunan SDM berkualitas secara keseluruhan. Prinsip ‘no one left behind’ menjadi bukti kuat kontribusi pemerintah dalam menekan kelompok marjinal dengan berdasarkan kepada Pancasila sebagai landasan filosofi bangsa dalam upaya pemerataan pendidikan untuk kehidupan yang lebih baik.

Indonesia telah merumuskan banyak kebijakan terkait mencapai pendidikan yang berkeadilan (Lega & Hartanto, 2023), dengan tujuan pendidikan yang merata, diantaranya kebijakan dalam perundang-undangan, pengadaan PIP (Program Indonesia Pintar) (Putri, 2024), kebijakan sekolah gratis (Romlah,

Imron, Maisyaroh, Sunandar, & Dami, 2023), termasuk pengadaan sekolah inklusi dalam upaya mengatasi kesenjangan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus (Achmad, 2023) (Mulyadi, 2017), program pemerintah mengenai wajib belajar 12 tahun (Aprillia & Santoso, 2024).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa, wacana ‘no one left behind’ yang diusung pada tahun 2022, memperkuat mengenai bagaimana pendidikan yang berkeadilan harus mampu menjangkau setiap lapisan, agar mampu berkontribusi bagi bangsanya, dalam mencapai Indonesia Emas kelak di tahun 2045. No one left behind adalah prinsip yang ditegakan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui jalan pendidikan. Secara aksiologi wacana ini bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan pembangunan SDM berkualitas secara keseluruhan. Prinsip ‘no one left behind’ menjadi bukti kuat kontribusi pemerintah dalam menekan kelompok marjinal dengan berdasarkan kepada Pancasila sebagai landasan filosofi bangsa dalam upaya pemerataan pendidikan untuk kehidupan yang lebih baik.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan berkeadilan di Indonesia secara filosofis telah memiliki dasar yang komprehensif dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan serta tujuan pembangunan berkelanjutan. Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi landasan filosofis kuat dalam implementasi pendidikan yang berkeadilan. Pendidikan tidak lagi dipahami sekadar sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagai instrumen strategis dalam membentuk individu yang mandiri, berkarakter, dan mampu berkontribusi secara sosial. Meskipun berbagai kebijakan telah menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata, implementasinya masih memerlukan penguatan, terutama dalam pemerataan akses, peningkatan kualitas layanan pendidikan, serta perhatian khusus terhadap kelompok rentan seperti masyarakat di daerah terpencil dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kebijakan, praktik pendidikan, dan nilai-nilai filosofis agar pendidikan berkeadilan benar-benar dapat terwujud secara optimal di seluruh lapisan masyarakat

Referensi

- Bauer, K. L., -Koenke, R. J., & Fort, M. P. (2025). What Is Social Connection in the Context of Human Need: An Interdisciplinary Literature Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 22(3), 1-22. Retrieved from https://www.mdpi.com/1660-4601/22/3/363?utm_source=chatgpt.com
- Kadim, A. M., & Hendriani, W. (2025). Transformasi Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus: Solusi atas Ketimpangan dan Kelemahan Pendidikan Inklusi di Indonesia. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2211-2221.
- Kristiawan, M. (2016). *FILSAFAT PENDIDIKAN The Choice is yours*. Yogyakarta: Penerbit Valia Pustaka.
- Lega, D., & Hartanto. (2023). Tanggungjawab Pemerintah dan Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan. *Adil Indonesia Jurnal*, 54-67.
- Nursyeha, M. I. (2025). Eksplorasi Peran Ontologi Dalam Pengembangan Penelitian Pendidikan Inklusif Dan Berkeadilan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 152-157. doi:<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10990>
- Nusaibah, S., Darlene Nanariain, D. M., & Istiqamah, D. (2025). Pendidikan Inklusif Dan Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Indonesia: Tinjauan Literatur Kritis. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3229-3240.

- Putri, D. K. (2024). Implementation of the Indonesia Pintar Program (PIP) at Primary School Level in Citangkil District. *Journal of Geopolitics and Public Policy (JOGPP)*, 2(1), 40-53.
- Rahma, A., & Wantini. (2024). Human Behavior in Social Context. *JII Jurnal Impresi Indonesia*, 3(6). doi:10.58344/jii.v3i6.5049
- Rahmadani, E., Armanto, D., Syafitri, E., & Umami, R. (2021). ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI, AKSIOLOGI DALAM PENDIDIKAN KARAKTER. *Journal of Science and Social Research*, 307–311. Retrieved from <https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/680/593>
- Voigt, S. (2023). Determinants of social norms I – the role of geography. *Journal of Institutional Economics*, 20. doi:<https://doi.org/10.1017/S1744137423000310>
- Achmad, W. (2023). Implications of Inclusive Education Policy in Guaranteeing the Rights. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 15(4), 4288-4297. doi: 10.35445/alishlah.v15i4.3847
- Aprillia, I., & Santoso, R. S. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN PATI. *Nova Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. doi: https://doi.org/10.14710/nova_idea.48895
- Boiliu, N. I., Chandra, R. I., & Rantung, D. A. (2022). Manusia sebagai subjek dalam merdeka belajar: Interpretasi atas revolusi kopernikan Immanuel Kant. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 400-410. Retrieved from <https://sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/600/242>
- D. P., Badariah, B., & Hidayat, S. (2022). Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 7911-7915.
- Edeji, O. C. (2025). Intersections of the Right to Education and Human Dignity in International Human Rights Law: A Purpose-Based Analysis. *Law*, 14(3). Retrieved from https://www.mdpi.com/2075-471X/14/3/33?utm_source=chatgpt.com
- Hassan, R., Jusoh, Z., & Rahimi, N. H. (2025). Reframing Inclusive Education through Epistemological Foundations and Global Practices for Supporting Diverse Learners. *Scientific Research*, 13(7). Retrieved from <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=144113>
- Khan, N. T. (2025). PHILOSOPHY OF EDUCATION. *J.Bio.Innov*, 14(3), 546-551. doi:10.46344/JBINO.2025.v14i03.19
- Lisan, M. F., & Maulana El-Yunusi, M. Y. (2024). AKSIOLOGI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT. *EL-DARISA: Jurnal Pendidikan Islam*, 113-121.
- Mulyadi, A. E. (2017). Policy of Inclusive Education for Education for All in Indonesia. *Policy & Governance Review*, 1(3), 201-212. Retrieved from <https://journal.iapa.or.id/pgr/article/view/57/29>
- Rahman, S., Nursalim, M., & Khami, A. (2024). Meaningful Learning in Philosophical Perspective: A Review of Ontology, Epistemology, and Axiology. *Journal of Educational Technology and Innovation*, 89 -94. doi:<https://doi.org/10.31537/jeti.v7i2.2152>Journal of Educational Technology and Innovation

- Romlah, S., Imron, A., Maisyarah, Sunandar, A., & Dami, Z. A. (2023). A free education policy in Indonesia for equitable access and improvement of the quality of learning. *Cogent Education*. Retrieved from <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2023.2245734>
- Rosnawati, Syukri, A., Badarussyamsi, & Rizki, A. F. (2021). Aksiologi Ilmu Pengetahuan dan Manfaatnya bagi Manusia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2). Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/35975/19428>
- Sari, C. K., Siregar, W. D., & Zahra, R. (2025). URGENSI DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH DASAR UNTUK MEWUJUDKAN GENERASI BERINEGRITAS. *GREAT*, 114-120. Retrieved from <https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/121/130>
- Sari, I. L., Septemi, Y., Yadi, S., Helita, & Elesti, Y. (2025). Systematic Literature Review: The Philosophical Foundations of Education and Social Norms in Indonesia. *PPSDP International Journal of Education*, 57-72.
- Sarwinda, W., Asyhar, R., Asrial, & Syaiful. (2025). DARI IDEALISME KE IMPLEMENTASI: ANALISIS FILOSOFIS DAN ARAH KEBIJAKAN BARU PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 406-420.
- Suarlin, Elpisah, & Nurfadila MY. (2026). Addressing Educational Inequality in Indonesia: Policy Challenges and Digital Solutions for Disadvantaged Regions. *Edelweiss: Journal of Current Innovation in Educational Research*, 24-36. doi: <https://doi.org/10.62462/edelweiss.v1i1.4>
- Sugiarta, I. M., Putu Mardana, I. B., Adiarta, A., & Artanayasa, I. W. (2019). FILSAFAT PENDIDIKAN KI HAJAR DEWANTARA (TOKOH TIMUR). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(2). Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/22187/13814>
- Supriatna, U. (2021). MANAJEMEN PENDIDIKAN DALAM KONSTELASI PROGRESIVISME (TELAHAH FILSAFAT PENDIDIKAN JOHN DEWEY). *Qalamuna -Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 337-348. Retrieved from <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/964/484>